

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagaimana yang kita pahami merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Hal ini selaras dengan gagasan Abraham Lincoln yang dikutip Sunarso (2015 : 10) tentang demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai unsur utama dalam berjalannya pemerintahan. Rakyat adalah pihak yang paling berkuasa.

Dalam perkembangannya, demokrasi menemukan berbagai bentuk dalam penerapannya. Terdapat dua jenis demokrasi yang bisa kita lihat hari ini yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sunarso (2015) menjelaskan demokrasi langsung merupakan penerapan dimana rakyat betul-betul dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan hukum, perumusan kebijakan, dan proses pemerintahan lainnya. Terdapat juga bentuk demokrasi lainnya yaitu demokrasi perwakilan, yang dimaksud demokrasi perwakilan ialah setiap orang memiliki hak untuk memilih orang-orang dalam proses yang disediakan. Dan orang-orang yang terpilih diberikan wewenang untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dengan dasar atas kepentingan rakyat. Mereka yang terpilih sebagai perwakilan bertanggungjawab terhadap rakyat.

Weber (dalam Bottomore 1992 : 8) menjelaskan bahwa penerapan demokrasi langsung hanya bisa diterapkan dalam bentuk masyarakat yang relatif kecil dan sederhana. Jika dengan kondisi bentuk masyarakat yang jauh lebih besar dan lebih kompleks demokrasi langsung tidaklah bisa diterapkan. Dalam kondisi masyarakat yang lebih besar dan kompleks, bentuk demokrasi yang ideal adalah demokrasi perwakilan.

Penerapan demokrasi perwakilan sendiri bisa kita lihat di Indonesia. Jika kita menggunakan argumentasi Weber diatas, tentu kita bisa menyepakati hal tersebut.

Dengan kondisi Indonesia yang secara kuantitas masyarakatnya sangatlah besar dan tersebar dalam wilayah yang luas, dan juga tingkat kompleksitas yang tinggi tentu demokrasi langsung mustahil diterapkan. Kondisi tersebut membuat kita bisa menerima argumentasi demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang cocok untuk diterapkan.

Penerapan demokrasi perwakilan bisa kita lihat dengan masing-masing kita memiliki hak untuk memilih orang-orang yang kita anggap pantas untuk mewakili kita dalam pemerintahan. Secara berkala melalui pemilihan umum kita menggunakan hak suara dan mempercayakan kepentingan kita kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tersebut akan merumuskan keputusan dengan mengatasmakan kepentingan kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat memberikan mandat kepada mereka untuk mewakili kekuasaan kita sebagai rakyat.

Saat kita berbicara tentang demokrasi perwakilan, kita tidak bisa melepaskan perhatian kita dari salah satu unsur penting di dalamnya, yakni partai politik. Kita menyadari bahwa partai politik adalah tempat dimana orang-orang yang akan kita pilih nantinya untuk mewakili kepentingan kita dilahirkan. Partai politik adalah dapur para calon-calon perwakilan dibentuk dan pada akhirnya akan ditawarkan kepada kita sebagai rakyat yang menginginkan perwakilan yang mampu mewakili kepentingan kita di dalam pemerintahan.

Partai politik memiliki peranan yang penting di dalam sistem demokrasi. Di satu sisi partai politik merupakan unsur dalam politik yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan juga kedudukan politik. Di sisi lainnya, partai politik merupakan wadah yang menjadi tempat rakyat menyampaikan aspirasinya. Hal itu merupakan wujud dari berlakunya sistem demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan.

Budiardjo (2008) mendefinisikan partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang di dalamnya terdapat anggota yang memiliki nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik yang secara umum dilakukan melalui cara yang sesuai dengan konstitusi untuk melaksanakan programnya.

Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa salah satu fungsi partai politik berkaitan dengan rekrutmen politik yang memiliki kaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud berkaitan dengan kepemimpinan internal partai dan kepemimpinan dalam skala yang lebih luas yaitu dalam kancah politik nasional. Rekrutmen yang dilakukan lalu menghasilkan pemimpin-pemimpin partai yang diharapkan mampu mengembangkan partai kedepannya dan berpeluang untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat nantinya untuk mewakili mereka di dalam pemerintahan.

Pentingnya peran partai politik dalam keberlangsungan demokrasi perwakilan tidak membuat keberadaan partai politik terbebas dari permasalahan yang melanda. Permasalahan yang seringkali muncul dalam perjalanan partai politik ialah kemunculan konflik internal yang muncul dan bahkan menyebabkan kemunculan partai-partai baru diluar partai politik yang sudah ada. Konflik internal ini tentunya mengganggu peran dari partai politik itu sendiri.

Konflik internal partai politik khususnya di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, bahkan fenomena ini sudah muncul di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam perjalanan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang berakar dari Sarekat Islam. PSII dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perseteruan internal.

Noor (2015) menjelaskan diantara perseteruan tersebut misalnya terjadi antara kelompok SI-Merah dan kelompok SI-Putih. Kelompok SI-Merah yang diisi oleh anggota PSII yang berhaluan komunis sementara SI-Putih diisi oleh anggota PSII yang non-komunis. Pihak SI-Merah yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, Darsono dan lainnya menginginkan agar paham Marxisme-Leninisme dijadikan sebagai dasar perjuangan Sarekat Islam. Hal itu mendapatkan penolakan dari SI-Putih yang menganggap bahwa paham komunis tidak berkesesuaian dengan ajaran Islam. Konflik tersebut berujung dengan keluarnya SI-Merah dari PSII dan mendirikan Sarekat Rakyat yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia.

PSII juga mengalami perpecahan internal lainnya antara kelompok Agus Salim dengan kelompok Abikusno Tjokrosujoso. Konflik tersebut muncul berkaitan dengan menentukan bagaimana PSII bersikap terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Agus Salim dan kelompoknya menginginkan agar PSII menerapkan strategi kooperatif dalam berhubungan pemerintahan kolonial Belanda. Disisi yang berbeda, Abikusno menganggap bahwa strategi non-kooperatif merupakan karakter yang melekat dan harus dipertahankan oleh PSII. Pertentangan ini kemudian menyebabkan kemunculan faksi Barisan Penyardar yang dipimpin oleh Agus Salim yang menyebabkan Agus Salim dan kelompoknya dipecat dan akhirnya mendirikan partai baru yang dikenal dengan Pergerakan Penyardar.

Pada era kemerdekaan konflik internal partai politik juga terjadi, misalnya konflik yang melanda Partai Masyumi. Partai Masyumi yang kala itu disusun oleh kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Partai Masyumi yang saat itu mengeluarkan sikap tidak akan bergabung di dalam dengan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang kemudian mencoba memunculkan ajakan yang ditujukan kepada internal Masyumi yang merupakan mantan petinggi PSII agar bergabung dalam pemerintahannya sebagai perwakilan kelompok Islam. Ajakan tersebut disambut oleh mantan petinggi-petinggi PSII yakni Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno akhirnya menyatakan bahwa PSII kembali berdiri dan bergabung dalam pemerintahan Amir Syarifuddin.

Pada era Orde Baru Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi atau penggabungan partai politik yang kemudian menghasilkan tiga partai politik saja. Salah satu yang berdiri adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan hasil peleburan dari NU, PSII, Perti, dan Parmusi.

Pada perkembangannya PPP kala itu mengalami konflik internal yang berujung dengan keluarnya NU dari PPP. Konflik ini dikarenakan perebutan pengaruh antara NU dengan Parmusi yang masing-masing mewakili kelompok tradisionalis dan kelompok modernis. Perebutan pengaruh tersebut bisa dibilang diungguli oleh Parmusi yang memimpin PPP cukup lama yang kemudian melahirkan

kebijakan yang dipandang oleh NU merupakan kebijakan yang tidak adil dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari PPP.

Selain PPP yang merupakan penggabungan partai-partai berhaluan agama Islam, terdapat juga Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI merupakan hasil penggabungan dari lima partai yaitu terdiri dari Partai Murba, IPKI, Parkindo, PNI, dan Partai Katolik. Dalam perjalanannya PDI juga mengalami perpecahan internal yang disebabkan oleh campur tangan pemerintah Soeharto saat itu.

Konflik yang berkaitan dengan perebutan kursi kepemimpinan antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah saat itu. Singkatnya, Megawati yang dianggap mengancam keberlangsungan rezim Soeharto saat itu coba disingkirkan dengan memunculkan Soerjadi dalam pergolakan internal PDI kala itu. Hal ini berujung dengan terdapatnya DPP kembar yaitu DPP yang dipimpin Megawati dan DPP yang dipimpin Soerjadi.

Konflik ini bahkan berujung dengan terjadinya bentrokan yang memakan korban jiwa pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro yang saat itu diduduki oleh DPP kepemimpinan Megawati. Bentrokan antara massa pendukung kubu Soerjadi dan kubu Megawati tersebut menurut Ipong (dalam Tajri, 2016 : 70) memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian harta benda.

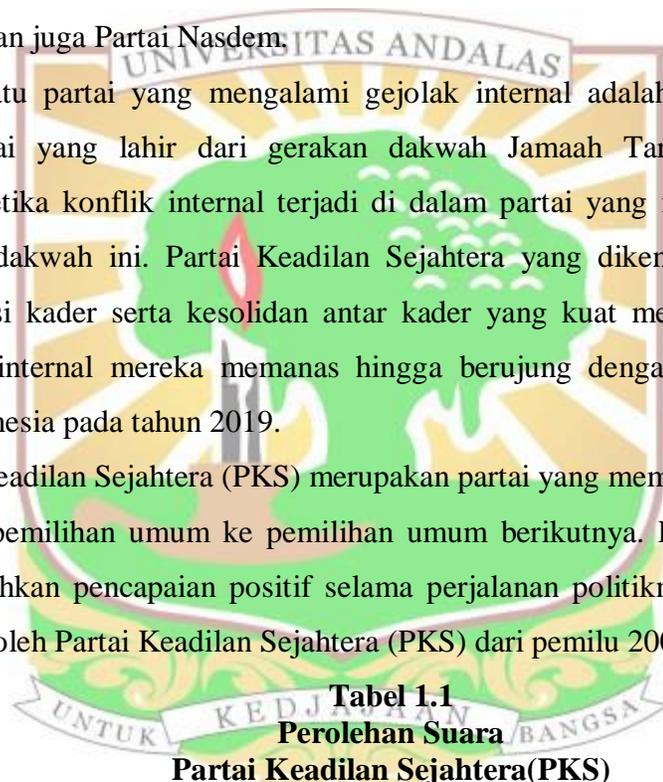
Pada akhirnya PDI dipimpin oleh Soerjadi yang mendapatkan dukungan pemerintah yang mengikuti Pemilu tahun 1997 mengalami kehilangan suara yang cukup besar. Pada saat itu PDI hanya memperoleh 11 kursi DPR. Hal ini dikarenakan Megawati yang mengatakan bahwa dia akan golput pada Pemilu tahun 1997 yang diikuti oleh pendukungnya.

Setelah lengsernya Soeharto, PDI mengadakan Kongres V di Bali menetapkan Megawati sebagai Ketum DPP PDI periode 1998-2003. Kemudian di Istora Senayan pada tanggal 14 Februari 1999 dideklarasikanlah perubahan Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selanjutnya dalam Kongres I PDI-P 27 Maret sampai dengan 1 April di Semarang menghasilkan ketetapan bahwa Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2000-2005.

Pada era reformasi yang diwarnai dengan euforia politik berupa kemunculan berbagai partai politik juga tidak terlepas dari gejolak perpecahan internal partai. Budiatri dkk (2017) menjelaskan bahwa pada era reformasi perpecahan partai disebabkan berbagai faktor misalnya perbedaan pandangan dalam hal visi-misi partai, perbedaan dalam dukungan pencalonan dalam Pemilu Presiden, tidak terakomodasinya aspirasi di dalam partai, perbedaan dukungan terhadap calon pimpinan partai. Contoh partai-partai yang berkonflik di era reformasi misalnya Partai Golkar yang kemudian melahirkan beberapa partai baru seperti Partai Gerindra, Partai Hanura dan juga Partai Nasdem.

Salah satu partai yang mengalami gejolak internal adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dari gerakan dakwah Jamaah Tarbiyah ini cukup mengejutkan ketika konflik internal terjadi di dalam partai yang menampilkan diri sebagai partai dakwah ini. Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal sebagai partai dengan militansi kader serta kesolidan antar kader yang kuat mengejutkan publik ketika konflik internal mereka memanas hingga berujung dengan lahirnya Partai GELORA Indonesia pada tahun 2019.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang memiliki catatan yang baik dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya. Partai dakwah ini mampu menorehkan pencapaian positif selama perjalanan politiknya. Berikut hasil yang diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari pemilu 2004-2019.



Tabel 1.1
Perolehan Suara
Partai Keadilan Sejahtera(PKS)
2004-2019

Pemilu (Tahun)	Perolehan Suara	Persentase	Jumlah Kursi
2004	8.149.457	7,20	45
2009	8.204.946	7,89	57
2014	8.480.204	6,79	40
2019	11.493.663	8,21	50

Sumber : kpu.go.id

Namun dibalik perkembangan positif yang diperlihatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mereka juga memiliki permasalahan berupa konflik internal yang terjadi di dalam tubuh partai. Zaiyatul Akmar (2019) menjelaskan bahwa konflik ini

terjadi semenjak tahun 2004 dan memuncak pada tahun 2016. Bermula dari perbedaan pandangan hingga melahirkan adanya faksi di dalam tubuh partai, yaitu faksi keadilan dan sejahtera.

Salah satu dampak dari adanya konflik ini ialah muncul kembali GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia). GARBI merupakan gerakan yang dipimpin oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. Gerakan ini juga memunculkan fenomena mengundurkan diri yang dilakukan kader-kader dari PKS. Diantara kader yang akhirnya keluar dari PKS diantaranya adalah Anis Matta, Mahfudz Siddiq dan Sita Sukanto.

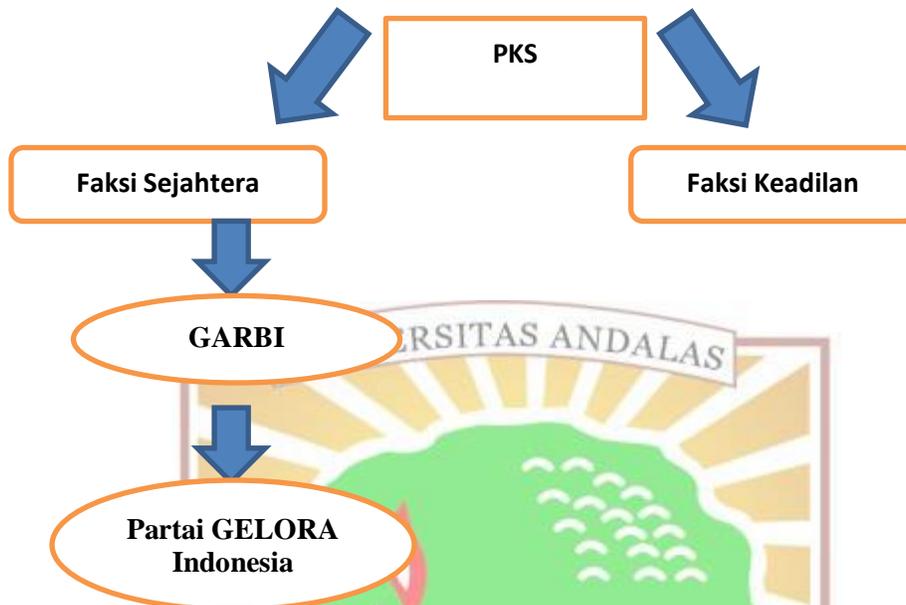
Selanjutnya GARBI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Deklarasi GARBI sebagai ormas dilakukan diberbagai daerah, pertama kali di Makassar pada bulan September 2018. Sementara itu untuk GARBI Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018.



Sumber :diolah oleh penulis

Pada tanggal 28 Oktober 2019 Partai GELORA Indonesia didirikan. Partai GELORA Indonesia dipimpin Anis Matta yang merupakan mantan Presiden PKS tahun 2013-2015 menjadi Ketua Umum Partai GELORA Indonesia. Partai GELORA Indonesia merupakan transformasi dari GARBI yang akhirnya menjadi Partai Politik.

Gambar 1.2
Proses Munculnya
Partai GELORA INDONESIA



Sumber : diolah oleh penulis.

Partai GELORA Indonesia juga didirikan di Sumatera Barat dengan M. Yasin sebagai ketua Dewan Dengurus Wilayah. Moh. Yasin sendiri sebelumnya merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Sumatera Barat periode 2015-2020 namun akhirnya mengundurkan diri dari PKS dan bergabung dengan Partai GELORA Indonesia.

Partai GELORA Indonesia muncul karena konflik internal partai PKS. Konflik ini terjadi di internal partai yang ada dipusat hingga ke tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perpecahan partai politik PKS khususnya yang terjadi di tingkat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini perlu dilakukan dikarenakan konflik ini terjadi di dalam partai yang memiliki garis sejarah yang panjang dan berakar dari gerakan keagamaan. Partai yang selama ini dikenal mampu meredam gejolak

internalnya justru mengejutkan dengan memuncaknya konflik hingga menyebabkan perpecahan berupa kemunculan Partai baru yakni Partai GELORA Indonesia.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Zaiyatul Akmar. Penelitian tersebut berjudul “Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016 : Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS”. Penelitian itu membahas terkait dengan konflik internal yang terjadi di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Penelitian lainnya yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin yang berjudul “Konflik Internal Partai Politik : Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa. Penelitian tersebut membahas terkait dengan konflik internal yang terjadi di dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang disebabkan oleh permasalahan yang bersifat pragmatis yang berkaitan dengan perebutan posisi di dalam internal partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaiyatul Akmar (2019) yang berjudul “Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016 : Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS” membahas terkait konflik internal yang terjadi di dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi dikalangan pimpinan partai di pusat dan mengkaji konflik internal yang belum sampai pada kondisi berdirinya Partai GELORA Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini membahas konflik internal PKS yang terjadi di tingkat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang sudah pada kondisi telah berdirinya Partai GELORA Indonesia.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin yang berjudul “Konflik Internal Partai Politik : Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa” terletak pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin membahas konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat pimpinan pusat. Sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji konflik internal partai PKS di Sumatera Barat yang akhirnya ikut terpecah dan memunculkan Partai GELORA Indonesia di Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung sejak tahun 2004 dan akhirnya memicu munculnya GARBI (Gerakan

Arah Baru Indonesia) serta munculnya fenomena mundurnya kader-kader PKS. GARBI yang awalnya mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat akhirnya bertransformasi menjadi sebuah partai politik yaitu Partai GELORA Indonesia. Konflik ini terjadi mulai dari kepengurusan pusat hingga tingkat daerah termasuk Sumatera Barat. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konflik Partai PKS dan Partai GELORA Indonesia di tingkat DPW Sumatera Barat?
2. Mengapa kader partai PKS DPW Sumatera Barat bertahan di dalam partai PKS DPW Sumatera Barat?
3. Mengapa kader partai PKS DPW Sumatera Barat keluar dari PKS DPW Sumatera Barat dan bergabung ke dalam partai GELORA Indonesia DPW Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dibagi dua: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan perpecahan partai politik PKS yang terjadi di Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menjelaskan proses konflik Partai PKS dan Partai GELORA Indonesia di Sumatera Barat.
2. Menjelaskan alasan kader partai PKS DPW Sumatera Barat bertahan di dalam partai PKS DPW Sumatera Barat.
3. Menjelaskan alasan kader partai PKS DPW Sumatera Barat keluar dari PKS DPW Sumatera Barat dan bergabung ke dalam partai GELORA Indonesia DPW Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat secara akademis dan praktis sebagai mana dijelaskan berikut ini.

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin keilmuan dan Sosiologi Politik. Serta penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi insan akademik baik mahasiswa maupun dosen. Serta sebagai bahan masukan bagi penulis lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.4.2. Bagi Akspek Praktis

Keberadaan partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan tempat dimana para pemimpin dilahirkan dan diusung untuk mewakili kepentingan masyarakat di dalam keberlangsungan negara. Penulis berharap penelitian yang penulis lakukan akan berguna nantinya sebagai bahan informasi bagi Politisi, Partai Politik, dan pihak-pihak yang memiliki fokus kajian terhadap partai politik terkait dengan fenomena konflik partai politik.

